

IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOUR* (IPEC) DALAM Mendukung ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2011-2015

Titha Julia Pratiwi¹
Nim. 1302045003

Abstract

The purpose of this study is to describe the implementation of the International Programme On The Elimination Of Child Labour (IPEC) program period 2011-2015. The reserch method of this thesis is descriptive, describing the implementation of the IPEC program to prevent of child labour in Indonesia especially in Kutai Kartangara. This study use concept of implementation and child labour to perform analysis. The result of this study that the implementation of the IPEC program to prevent of child labour in Kutai Kartanegara implemented by ordinance of Zona Bebas Pekerja anak. That ordinance has policy for abolition and prevention of child labour. The programmes are Socialization, Improvement of Human resource, Social Sector, and Law Enforcement. The implementation of the programs that has going well, it is evidence by result achieved from the programs that has been work.

Keywords: *Implementation, IPEC, Child Labour*

Pendahuluan

Pengertian pekerja anak adalah meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan.(Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003). Dalam skripsi ini penulis mencoba mengulas bagaimana implementasi dari *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) dalam pencegahan pekerja anak di Indonesia khususnya ZBPA di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) pekerja anak adalah mempekerjakan anak yang membuat anak kehilangan masa kanak-kanak mereka, potensi mereka dan martabat mereka, dan hal tersebut membahayakan perkembangan mental mereka. Yang dimaksud anak dalam konvensi ILO No. 182 tentang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : pratiwi_titha@yahoo.com

Pelarangan dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ialah orang yang berusia dibawah 18 tahun. (<http://www.ilo.org>)

Didirikan pada tahun 1919. ILO bertanggung jawab untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja secara layak, meningkatkan perlindungan perlindungan sosial dan menguatkan dialog terkait permasalahan dunia kerja. *International Labour Organization* (ILO) merupakan satu-satunya badan PBB yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja ke dalam dialog tripartit untuk membuat kebijakan dan program terkait perburuhan dan ketenagakerjaan. Untuk menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) pada tahun 1992 dengan tujuan utama menghapus pekerja anak. Langkah ini diupayakan melalui penguatan kapasitas negara untuk menyelesaikan masalah dan mempromosikan gerakan memerangi pekerja anak.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan Pekerja Anak, pada tahun 1999 pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO No. 139 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan dikeluarkannya Undang-undang NO. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia buruh anak atau pekerja anak untuk di Indonesia berjumlah 1,5 juta anak pada tahun 2010(Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Pedoman Umum PPA-PKH Tahun 2016*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, 2016) kemudian pada tahun 2011 terdapat sekitar 933.450 ribu anak yang menjadi pekerja anak dari total penduduk Indonesia sekitar 242 juta jiwa di tahun 2011.(Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Data dan Informasi Pekerja Anak*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, 2015) Hal ini berimbas pada masalah kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu mempunyai kesempatan yang kecil untuk bersekolah. Rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, ketidaksetaraan termasuk sebagian faktor penyebab timbulnya pekerja anak.

Pada tahun 2002, mantan Bupati Kutai Kartanegara Syauckani HR bertemu dengan petinggi ILO (*International Labour Organization*) tentang pelaksanaan zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai awal dari terbentuknya program ZBPA. Dalam pertemuan tersebut antara Syauckani HR dengan ILO menawarkan untuk kerjasama pencegahan pekerja anak di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari penawaran tersebut Bupati Kutai Kartanegara menyetujuinya, persetujuan tersebut beralasan karena sebelumnya di Kabupaten Kutai Kartanegara telah merencanakan program Gerbang Dayaku dimana pilar utamanya yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan di sektor perdesaan dan pembangunan daerah

perkotaan, sementara itu Zona Bebas Pekerja Anak berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia di Kutai Kartanegara. (www.sapos.co.id)

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti dengan berbagai perangkat yang mampu mendorong terwujudnya komitmen dalam penghapusan pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, di antaranya adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak, Rencana Strategis ZBPA 2005-2010, Termasuk pembentukan Tim Komite ZBPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih sebagai Kabupaten percontohan Zona Bebas Pekerja Anak. (<http://www.kutaikartanegarakab.go.id>). Pentingnya zona bebas pekerja anak untuk memberikan perlindungan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Zona bebas pekerja anak untuk menekan angka pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dengan diberlakukannya zona bebas pekerja anak telah terjadi penurunan pekerja anak. Penurunan jumlah pekerja anak ini tidak terlepas dari program gerakan pengembangan dan pemberdayaan kutai (Gerbang Dayaku). Dengan zona bebas pekerja anak maka masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah yang mendapatkan perhatian dunia. (www.kaltimpost.co.id)

Namun pada tahun 2011 terjadi kasus perdagangan manusia, ditemukan dua korban yang masing-masing berusia 15 tahun yang berasal dari Kota Samarinda yang dipekerjakan sebagai PSK di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara. (<http://respository.umy.ac.id>). Lalu pada tahun 2015, ditemukan tiga gadis yang berumur 14-16 tahun yang bekerja sebagai PSK di lokasi Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa. (www.kutaikartanegara.com). Lalu ditemukan 10 orang pekerja anak yang bekerja di tempat pencucian motor di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. (Jumaidi Nur. *Pekerja Anak di Sektor Informal Pencucian Mobil Tenggarong*. Tenggarong: Universitas Kutai Kartanegara, 2015. hlm, 3.) Dan pekerja anak yang berdagang tahu gunting di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

ILO-IPEC

Didirikan pada tahun 1919, ILO bertanggung jawab untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja secara layak, meningkatkan perlindungan sosial. *International Labour Organization* merupakan satu-satunya badan PBB yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja ke dalam dialog tripartite untuk membuat kebijakan dan program terkait perburuhan dan ketenagakerjaan.

Untuk menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk *International Programme On The Elimination of Child Labour* (IPEC) pada tahun 1992 dengan tujuan yaitu menghapuskan pekerja anak dengan cara memperkuat kapasitas nasional untuk menangani masalah tersebut dan menciptakan gerakan aksi dunia untuk memerangi pekerja anak. *International Labour Organization – International Programme On The Elimination of Child Labour* (ILO-IPEC) merupakan program kerjasama teknis tentang pekerja anak terbesar di dunia. Di lebih dari 90 negara, IPEC menginspirasi, mengarahkan dan mendukung usaha nasional untuk menghapus pekerja anak.

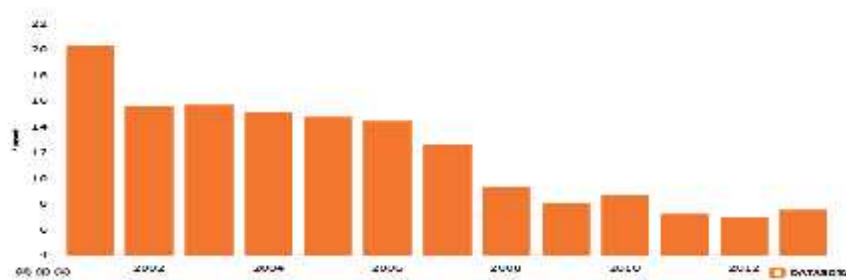
Program ILO-IPEC tidak hanya menarik anak-anak dari pekerja anak, tetapi juga menyediakan pendidikan untuk para pekerja anak dan membantu keluarga mereka. Program-program ILO-IPEC dalam menangani pekerja anak diantaranya: (www.ilo.org)

- a. *Child Labour Monitoring (CLM)*/ Pemantauan Buruh Anak. CLM adalah proses aktif yang memastikan terlaksananya dan terkoordinasinya pemantauan pekerja anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsekuensi dari pemantauan tersebut, anak yang dipekerjakan berada dalam kondisi yang sah dan aman dari eksploitasi dan bahaya di tempat kerja.
- b. *Corporate Social Responsibility (CSR)*/ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara melembaga dan berkelanjutan.
- c. *Education*/ Pendidikan. Pendidikan adalah komponen penting dari setiap upaya efektif yang dilakukan untuk menghapus pekerja anak.
- d. *Labour Inspection*/ Tinjauan Pekerja. Tinjauan pekerja adalah fungsi umum pemerintahan buruh yang memastikan penerapan perundang-undangan perburuhan di tempat kerja.
- e. *Time Bound Programmes (TBP)*/ Program Terikat Waktu. TBP merupakan salah satu sarana pendekatan yang ditempatkan oleh *International Programme On The Elimination of Child Labour (IPEC)* untuk membantu Negara-negara dalam memuhi kewajiban mereka dibawah Konvensi.

Kondisi Pekerja Anak

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah faktor kemiskinan. Zona Bebas Pekerja Anak sudah berlangsung sejak tahun 2002, dan berikut statistik kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2002 hingga 2012.

Gambar Persentase Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 2002-2012



Sumber: Databoks, Katadata Indonesia

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa persentase dari kemiskinan di Kutai Kartanegara mengalami penurunan dari tahun 2002 hingga 2012. Hal tersebut disebabkan dengan adanya program pengembangan ekonomi kerakyatan yang membantu masyarakat mengembangkan usaha agar dapat menopang kebutuhan sehari-hari. Dan hal tersebut juga menekan pekerja anak di Kutai Kartanegara.

Dapat diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, jumlah penduduk miskin di Kutai Kartanegara pada tahun 2015 terbanyak dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yaitu sebesar 56.99 ribu jiwa. Banyak kasus terjadi anak-anak justru tidak betah tinggal di rumah bersama orang tua tetapi justru tinggal di jalan, cenderung berkumpul dengan teman sebaya dan mangkal di tempat-tempat umum. Berbagai kegiatan mereka lakukan, mulai dari mengamen, serta nongkrong, hingga judi dan minum-minuman keras. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan amat meresahkan orang tua dan keluarga.

Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

Pekerja anak pada dasarnya merupakan gejala masalah kemiskinan yang meluas dan ketidaksetaraan di tengah-tengah masyarakat. Namun pekerja anak juga merupakan faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Dengan kondisi orang tua yang miskin, sehingga mereka menyuruh anak-anak mereka untuk bekerja. Namun kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja anak dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan segala jenis pekerjaan dan perbudakan. (Beniharmoni Harefa, “*Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*”. Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta, 2015. Hlm, 46)

Faktor yang menyebabkan pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dijelaskan sebagai berikut : (Fitriani, “*Makalah Zona Bebas Pekerja Anak: Solusi Pemberantasan Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia*”. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2009. hlm, 10.)

1. Rendahnya Ekonomi Keluarga (Kemiskinan)

Peran serta keluarga dalam mengurangi pekerja anak di Kutai Kartanegara tidak berfungsi dengan baik karena ketika kondisi keluarga terancam oleh minimnya sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh kepala keluarga, dan hal tersebut membuat orang tua terpaksa melibatkan anak mereka untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan di rumah.

Tabel Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara					
Dalam jumlah ribu jiwa					
Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah	47.30	47.10	52.14	52.53	56.99

Sumber: BPS Kalimantan Timur

Dapat dilihat dari data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut bahwa dari Tahun 2011-2015 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat yaitu pada tahun 2011 terdapat 47.30 ribu jiwa. Pada tahun 2012 menurun menjadi 47.10 ribu jiwa, namun pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 52.14 ribu jiwa. Dan terus meningkat di tahun 2014

menjadi 52.53 ribu jiwa dan meningkat drastis pada tahun 2015 hingga 56.99 ribu jiwa.

Selain data dari jumlah penduduk miskin di atas, peneliti juga sempat melakukan wawancara dengan pekerja anak di Kukar yang berjualan tahu gunting. Anak tersebut terpaksa bekerja karena ibunya tidak mampu bekerja karena harus menjaga adiknya, dan ayahnya sudah meninggal dunia. Hal tersebut yang membuat anak tersebut memilih untuk bekerja sebagai pedagang tahu gunting. Karena tidak adanya kepala keluarga yang mencari nafkah sehingga anak harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pendidikan

Pendidikan yang rendah juga merupakan salah satu faktor terjadinya pekerja anak. Anak yang terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan seperti *drop out*, atau dengan alasan pribadi seperti malas, dipengaruhi teman atau bahkan sudah menikah.

Tabel Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah Anak Putus Sekolah di Kukar tahun ajaran 2014/2015				
Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMA	SMK
Jumlah	105	79	112	152

Sumber: Statistik Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tabel diatas jumlah anak putus sekolah diambil dari data tahun ajaran 2014/2015 dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Pada tingkat SD ditemukan 105 orang anak yang putus sekolah. Lalu pada tingkat SMP terdapat 79 orang anak. Tingkat SMA terdapat 112 orang anak yang tidak bersekolah dan SMK ditemukan 152 orang anak. Karena pendidikan yang rendah mereka terpaksa harus bekerja dan menjadikan mereka sebagai pekerja anak. Hal tersebut juga memperngaruhi sumber daya manusia yang dihasilkan. Dengan tingkat pendidikan rendah, mereka tidak memiliki keterampilan untuk masuk ke dunia kerja.

Zona Bebas Pekerja Anak di Kutai Kartanegara

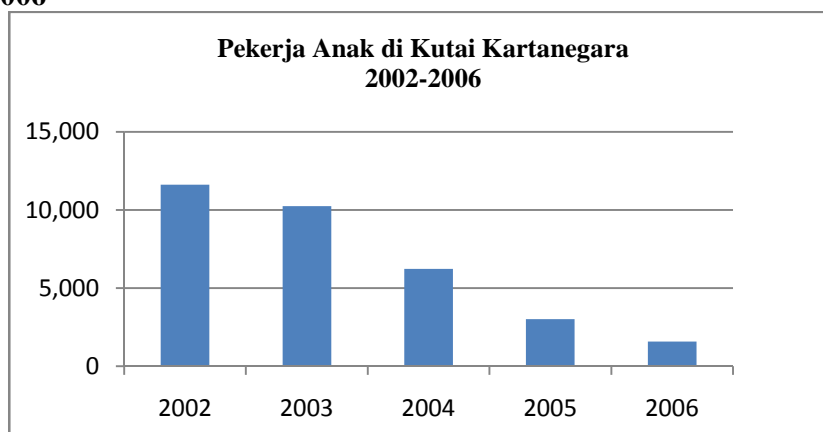
Pada tahun 2002 di Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum adanya program Zona Bebas Pekerja Anak ditemukan 11.623 orang. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha mencegah dan menghapus pekerja anak, hal ini mengingat anak sebagai generasi penerus yang harus dilindungi, dibina dan dididik untuk dapat tumbuh berkembang dengan wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektual.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 18 kecamatan, diantaranya adalah: Tenggarong, Tenggarong seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Sebulu, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Pemetaan wilayah zona bebas pekerja anak (ZBPA) disetiap Kecamatan ini bisa membantu data – data pekerja anak bisa dilakukan secara terperinci dan tepat guna

melalui tingkat kecamatan dan jajaran di bawahnya. Wilayah – wilayah yang sudah ditetapkan sebagai program zona bebas pekerja anak (ZBPA) oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara segera melakukan aksi seperti pendataan ulang dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan anak –anak.

Setelah melakukan program Zona Bebas Pekerja Anak dari tahun 2002 di Kabupaten Kutai Kartanegara, program ZBPA dapat mengurangi pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dapat dilihat dari table berikut ini:

**Tabel Tingkat Pekerja Anak di Kutai Kartanegara
2002-2006**



Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kukar

Pada saat direncanakan zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara akhir tahun 2002 jumlah pekerja anak mencapai 11.623 orang tahun 2004 jumlah pekerja anak menurun menjadi 6.236 orang, tahun 2005 menjadi 3.102 orang dan terus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tahun 2006 menjadi 150 anak.(Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “*Makalah ZBPA Kabupaten Kutai Kartanegara*”. Tenggarong: Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2004, hlm. 3)

Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara dalam pencegahan pekerja anak diantaranya ialah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anak.
- b. Meningkatkan akses dan mmeperkuat kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non-formal
- c. Melakukan kerjasama dalam meningkatkan kesadaran akan masalah pekerja anak dan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.
- d. Serta mengintegrasikan program-program pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi kongkret atau nyata. Implementasi menurut Fullan ialah

proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Proses implementasi terdapat tiga unsur penting, yaitu: (Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, dalam Muhammad Arie Pratama, *Implementasi Program Global Forest and Trade Network Oleh World Wide Fund Indonesia di Kalimantan Timur Tahun 2009-2014 (Studi Kasus PT. Ratah Timber)*. Samarinda: Universitas Mulawarman. 2015)

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Target *Groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, berupa perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dapat dijelaskan bahwa dalam *International Programme On The Elimination of Child Labour* (IPEC) yang diimplementasikan melalui program-program dan bantuan secara teknis Target *groups* yang dituju dalam implementasi program ini adalah perusahaan yang bekerja pada sektor pertambangan, lembaga pendidikan dan masyarakat agar dapat mencegah terjadinya pekerja anak di Kutai Kartanegara. Selain itu, Indonesia khususnya Pemerintah Kutai Kartanegara sebagai implementor dalam implementasi program tersebut.

Konsep Pekerja Anak

Salah satu landasan bagi pemerintah tentang peraturan yang mendefinisikan pengertian pekerja anak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.

Seorang anak akan dikatakan sebagai pekerja anak apabila memenuhi indikator:

- a. Anak bekerja setiap hari.
- b. Anak tereksplorasi.
- c. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
- d. Waktu sekolah terganggu atau tidak sekolah.

Menurut Tjandraningsih, dalam banyak kasus dikalangan keluarga miskin, anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja pada pekerja anak ada beberapa bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak di bayar. Dampak anak yang bekerja diantaranya adalah: (Emmy Sugiyani, *Perlindungan Hak Bagi Pekerja Anak Melalui Program Pendidikan Literacy Class di Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009. hlm, 26)

- a. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain,

- b. Terganggu proses tumbuh kembang anak,
- c. Terganggu kesehatan fisik dan mental anak,
- d. Rasa rendah diri dalam pergaulan,
- e. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif,
- f. Rentan mengalami kecelakaan kerja,
- g. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan,
- h. Rentan menciptakan generasi miskin.

Dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pekerja anak antara lain: (Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2005. hlm, 29)

- a. Mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.
- b. Meningkatkan program bantuan beasiswa.
- c. Sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungannya. Tingkat deskriptif digunakan untuk menerangkan masing-masing subjek yang akan dipakai dalam penelitian ini dan untuk melihat subjek yang terkait sehingga hipotesa yang ada dapat diuji. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu Implementasi International Programme On The Elimination of Child Labour (IPEC) Dalam Mendukung Zona Bebas Pekerja Anak di Kutai Kartanegara 2011-2015.

Hasil Penelitian

Implementasi IPEC di Kutai Kartanegara

Implementasi program *International Programme On The Elimination of Child Labour* (IPEC) dalam pencegahan pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan melalui konsep implementasi yang dikemukakan oleh Hoogerwerf. Menurut Hoogerwerf dalam proses implementasi setidaknya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, adanya target *groups*, dan adanya unsur pelaksana (*implementator*).

Tujuan dari Zona Bebas Pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan kelompok sasaran yaitu:

- a. Semua anak yang melakukan pekerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berumur di bawah 15 tahun dan anak yang berumur 15-18 tahun yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

- b. Semua pihak yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak juga memiliki batasan tertentu seperti pekerjaan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh anak yaitu:

- a. Semua pekerjaan yang melanggar hak-hak dasar anak.
- b. Semua pekerjaan yang berbahaya atau mengancam keselamatan, menguras tenaga, merusak kondisi fisik serta mengeksploitasi kemudahan usia.
- c. Semua pekerjaan yang merusak pertumbuhan mereka atau merampas masa kanak-kanak.
- d. Semua pekerjaan yang menghalangi mereka untuk bersekolah dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan dasar untuk masa depan mereka.

Berikut ini program-program IPEC dalam pencegahan pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Pemberian informasi / Sosialisasi

Pemberian informasi atau Sosialisasi zona bebas pekerja anak (ZBPA) yang demikian intensif dilakukan oleh Komite Zona Bebas Pekerja Anak mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. (Rizal Abdullah. *Efektivitas Pelaksanaan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013. hlm, 7)

Tahap pemberian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat umum, orang tua dan anak melalui berbagai bentuk seperti penyuluhan, ceramah, seminar, brosur-brosur, kunjungan atau pendekatan langsung dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tahap sosialisasi ini dimaksudkan agar setiap komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memahami untuk juga ikut melakukan upaya pencegahan yang bertujuan agar anak tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil terlepas dari dunia kerja agar tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya terutama hak dasarnya sebagai anak yaitu hak untuk mendapat pendidikan sebagai bekal di masa depan.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada pengembangan sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan dari akses pendidikan. Dengan adanya program pemerintah yang mewajibkan untuk wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program rujukan yang dapat menjadi acuan dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu peningkatan kualifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK dengan salah satu upaya yang dilakukan yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Cambridge University Press Inggris untuk meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerjasama tersebut dilakukan pada tahun 2014 dalam program pengembangan pendidikan bahasa Inggris, khususnya bagi tenaga pendidik di tingkat SMP dan SMA/SMK.

Selain itu dalam upaya mewujudkan program zona bebas pekerja anak (ZBPA) dapat dukung dengan upaya meningkatkan keterampilan untuk memberikan atau

meningkatkan keterampilan anak yang telah terlepas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pelatihan keterampilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak yang bersangkutan dalam rangka membekali diri memasuki dunia kerja maupun membangun kegiatan usaha mandiri. Kegiatan pelatihan keterampilan akan sangat berdaya guna dan berhasil guna jika dibarengi dengan pemberian bantuan modal usaha, sehingga keterampilan yang dimiliki langsung bisa diimplementasikan.

3. Bidang sosial

Dalam Bidang sosial salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu menjalankan fungsi dari Panti Sosial sebagai wadah untuk konseling dan rehabilitasi dalam meningkatkan keterampilan dari anak-anak yang telah tidak melakukan pekerjaan yang tergolong pada pekerjaan terburuk untuk anak.

Panti sosial merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Panti sosial merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti kebutuhan fisik dan mental anak. Untuk panti sosial anak terdapat di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Anak-anak yang tinggal di panti sosial diberikan keterampilan untuk mengembangkan minat dan bakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas Sosial mengadakan pelatihan keterampilan membuat tas dari tali kur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2015 diadakan selama 14 hari, yang bertempat di Aula Panti Sosial yang ada di Tenggarong, dengan mendatangkan dua instruktur untuk melatih para anak dalam membuat tas dari tali kur yang berasal dari ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum langkah awal yang diambil ialah penyusunan strategi kerja sama dengan departemen/instansi sektoral terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk membebaskan dan menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Selanjutnya penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah/kewilayahan baik secara pre-emptif, preventif dan represif. Pengambilan langkah-langkah dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan yang bersifat: Pre-emptif, Preventif dan Represif. Penuntutan terhadap para pelaku yang melibatkan anak dalam pekerja anak dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lalu dilaksanakannya koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam pencegahan dan penghapusan pekerja

anak, mulai dari tahap perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian. Dan ditindak lanjuti atas segala pengaduan tentang eksploitasi pekerja anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya hasil yang diperoleh dari program yang telah dijalankan membuktikan, bahwa program IPEC yang selama ini diimplementasikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam ZBPA telah berjalan baik. Namun, menurut Marilee S. Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi 2 variabel, yaitu variable isi kebijakan dan variable lingkungan kebijakan. Salah satu point dalam dalam variable isi kebijakan menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dilihat dari sejauh mana perubahan yang diinginkan.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan program IPEC yang diimplementasikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dikatakan bahwa program dalam menghapus dan mencegah pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara belum mencapai perubahan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan dengan masih ditemukannya pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jangka waktu 2011-2015. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah program ZBPA yang selama ini dijalankan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata terdapat faktor lain yang menyebabkan tujuan utama dari program ZBPA yaitu untuk mencegah dan menghapus pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara belum mencapai perubahan yang diinginkan.

Faktor yang menghalangi berjalannya program ZBPA ialah pelaksanaan program ZBPA yang sudah berakhir dan pengawasan terhadap pekerja anak yang berkurang. Karena program Zona Bebas Pekerja Anak ini dijalankan dari tahun 2002 hingga 2010, sehingga ketika program ZBPA tersebut sudah selesai pada tahun 2010 memang menekan jumlah pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dari tahun 2002 tercatat sebanyak 11.623 orang menjadi 1.579 orang di tahun 2006, dan terus mengalami penurunan hingga berakhirnya ZBPA tahun 2010.

Tetapi pada tahun 2011 hingga 2015 masih ditemukannya pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan ditemukan pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk. Dengan berakhirnya program ZBPA yang dijalankan di Kabupaten Kutai Kartanegara membuktikan bahwa kembali ditemukannya pekerja anak di Kutai. Lalu karena tidak ada lagi program ZBPA yang dijalankan, maka pengawasan terhadap pekerja anak juga berkurang. Sehingga program-program yang sudah diimplementasikan seperti sosialisasi, pengembangan sumber daya manusia, bidang sosial dan penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal dalam pencegahan pekerja anak.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program IPEC di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Zona Bebas Pekerja Anak telah berjalan dengan baik, namun terdapat faktor yang menghambat upaya dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Zona Bebas Pekerja Anak merupakan strategi baru yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan penghapusan pekerja secara bertahap dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan.

Karena itu upaya untuk penghapusan dan pencegahan pekerja anak dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi social dan kemasyarakatan , lembaga swadaya masyarakat serta semua kalangan dan masyarakat secara bersama-sama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi program *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) dalam pencegahan pekerja anak di Kutai Kartanegara, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Indonesia dan *International Labour Organization (ILO)* dalam penanggulangan dan penghapusan pekerja anak diimplementasikan melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua, Zona Bebas Pekerja Anak adalah area tertentu yang dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktifitas mempekerjakan anak yang dilarang menurut Peraturan Daerah No. 9 tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan konvensi ILO No. 138 dan konvensi ILO No. 182.

Ketiga, Implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pencegahan pekerja anak di Kutai Kartanegara diantaranya adalah Sosialisasi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Bidang Sosial, dan Penegakan Hukum.

Poin terakhir dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Program ZBPA yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara telah berjalan dengan baik, terbukti dari adanya hasil yang dicapai dari program yang telah dijalankan yaitu berkurangnya pekerja anak yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, dan Skripsi

Abdullah, Rizal. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Harefa, Beniharmoni. 2015. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Depublish Yogyakarta.

Kementrian Ketenagakerjaan RI. 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Nur, Jumaidi. 2015. *Pekerja Anak di Sektor Informal Pencucian Mobil Tenggara*. Tenggara: Universitas Kutai Kartanegara.

Sugiyani, Emmy. 2009. *Perlindungan Hak Bagi Pekerja Anak Melalui Program Pendidikan Literacy Class di Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Suyanto, Bagong. 2003. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press.

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2004. *Modul Zona Bebas Pekerja Anak Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tenggara: Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fitriani. 2009. Makalah Zona Bebas Pekerja Anak: Sosis Pemberantasan Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Hoogerwerf, dalam Muhammad Arie Pratama *Ilmu Pemerintahan*. 2015. *Implementasi Program Global Forest and Trade Network Oleh World Wide Fund Indonesia di Kalimantan Timur Tahun 2009-2014 (Studi Kasus PT. Ratah Timber)*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Internet

Anwar, Hafidz. *Sosialisasi Zona Bebas Pekerja Anak*. (<http://www.kutaikartanegarakab.go.id>)

Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim. *Banyaknya Anak Asuh yang Terdaftar, yang Menerima Bantuan dan yang Belum Menerima Bantuan Menurut Kabupaten/Kota, 2015*. (<https://kaltim.bps.go.id>)

Gede, I. *Pelaksanaan Zona Bebas Pekerja Anak*. (www.sapos.co.id)

ILO. *About the International Programme On The Elimination of Child Labour (IPEC)*. (<http://www.ilo.org>)